



## Sejarah Pengembangan Organisasi Pendidikan Islam di Indonesia

Eva Athifah<sup>1</sup>, Muhamad Ihsan Khuluki<sup>2\*</sup>, Beta Hikmah Zahrotunnisa<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : [244110401099@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:244110401099@mhs.uinsaizu.ac.id)

**Abstract.** *This study traces the history of the development of Islamic educational organizations in Indonesia from the pre-colonial period to the Reformation era using a descriptive qualitative approach through a literature review. The findings indicate that Islamic education developed gradually, beginning with informal institutions centered around mosques and pesantren, and later responding to colonial pressures with the emergence of organizations such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. This development continued through the formal recognition of madrasahs during the independence era, modernization under the New Order regime, and more dynamic institutional transformations during the Reform era. Amid various challenges such as educational dualism, resource constraints, and the threat of extremism, Islamic educational organizations continue to innovate by integrating religious and general knowledge without abandoning their Islamic identity. This study affirms that Islamic educational organizations are the primary foundation for building a character-based national education system.*

**Keywords:** *Islamic educational organizations; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama; madrasah; pesantren.*

**Abstrak.** Penelitian ini menelusuri sejarah pengembangan organisasi pendidikan Islam di Indonesia dari masa pra-kolonial hingga era reformasi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berkembang secara bertahap, berawal dari lembaga informal berbasis masjid dan pesantren, lalu merespons tekanan kolonial dengan lahirnya organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Perkembangan berlanjut melalui pengakuan formal madrasah pada masa kemerdekaan, modernisasi di era Orde Baru, hingga transformasi kelembagaan yang lebih dinamis pada era reformasi. Di tengah berbagai tantangan seperti dualisme pendidikan, keterbatasan sumber daya, dan ancaman ekstremisme, organisasi pendidikan Islam terus berinovasi mengintegrasikan ilmu agama dan umum tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Penelitian ini menegaskan bahwa organisasi pendidikan Islam merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berkarakter.

**Kata kunci:** Organisasi pendidikan Islam; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama; madrasah; pesantren.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pendidikan Islam merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak Islam masuk ke Nusantara, pendidikan menjadi instrumen utama dalam penyebaran nilai-nilai keislaman sekaligus pembentukan karakter umat. Sebagaimana ditegaskan oleh Nasimuddin, Hasani, dan Muhammad (2024), pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional, tidak hanya dalam pembentukan karakter dan penguatan identitas keagamaan, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap perkembangan masyarakat Indonesia secara luas

Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia tidak hadir dalam ruang yang vakum. Ia tumbuh dan berkembang beriringan dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berubah. Rahmat (2023) mencatat bahwa organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan nasional, dan dalam konteks pengembangan pendidikan, organisasi-organisasi ini telah berkiprah signifikan untuk memajukan pendidikan yang bermutu di tanah air. Kehadiran organisasi kemasyarakatan Islam bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun tradisi pendidikan Islam yang terstruktur dan berkelanjutan. (Rahmat 2023)

Lahirnya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dll merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh (Fadli, 2023), organisasi-organisasi Islam ini terbentuk karena adanya dorongan patriotisme dan nasionalisme serta sebagai respons terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada awal abad ke-19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Lebih dari sekadar gerakan sosial-keagamaan, organisasi-organisasi ini menjadi agen perubahan pendidikan yang paling berpengaruh di Indonesia.

Kajian tentang sejarah pengembangan organisasi pendidikan Islam di Indonesia menjadi sangat relevan untuk terus dilakukan, mengingat dinamika yang terus berubah di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. (Adawiyah and Sukorejo 2026) menegaskan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang peran organisasi-organisasi ini dan reaktualisasi pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam tetap penting untuk merespons tantangan pendidikan Islam masa kini. Tulisan ini hadir untuk memetakan secara historis bagaimana organisasi pendidikan Islam di Indonesia tumbuh, berkembang, dan mentransformasi diri dari masa ke masa.

Artikel ini bertujuan menelusuri asal-usul pendidikan Islam sebelum masa kolonial, mengkaji lahir dan perkembangan organisasi pendidikan Islam dari masa kolonial hingga Orde Baru, menganalisis transformasinya pada era reformasi, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pada masa kini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel, yang berkaitan dengan sejarah pengembangan organisasi pendidikan Islam di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk memahami proses lahir, perkembangan, serta peran organisasi pendidikan Islam dalam berbagai periode, mulai dari masa pra-kolonial hingga era reformasi. Data yang terkumpul kemudian diolah secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang utuh tentang dinamika dan kontribusi organisasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asal-Usul Pendidikan Islam di Indonesia (Masa Pra-Kolonial)**

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat panjang, dimulai sejak proses masuknya Islam ke Nusantara. Pada masa awalnya, pendidikan Islam bersifat non-formal yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yahdi (2024) menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung melalui berbagai saluran, terutama perdagangan, tasawuf, perkawinan, dan seni budaya. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab, Persia, dan India yang telah ikut andil dalam kegiatan perdagangan di Nusantara, sekaligus membawa dan menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi interpersonal yang berlangsung dalam berbagai kesempatan. (Herlambang, 2024).

Masuknya Islam ke Nusantara tidak dapat dipisahkan dari tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang sebelumnya di dunia Islam. Hidayat (2024) menjelaskan bahwa pada periode keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-10, perkembangan ilmu pengetahuan didukung oleh etos keilmuan yang kuat dan kebijakan pemerintah yang mendorong lahirnya ilmuwan Muslim yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Tradisi intelektual ini kemudian menjadi salah satu landasan filosofis bagi perkembangan pendidikan Islam di berbagai wilayah, termasuk Nusantara.

Seiring berkembangnya komunitas Muslim di Nusantara, pendidikan Islam mulai dilaksanakan dalam lingkungan informal seperti masjid, surau, langgar, dan rumah-rumah ulama. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu keislaman sekaligus pembentukan moral dan karakter masyarakat Muslim (Adawiyah, 2026). Pada tahap awal ini, pendidikan Islam masih bersifat sederhana, namun hubungan antara guru dan murid terjalin erat sebagai dasar pembentukan tradisi keilmuan Islam.

Perkembangan pendidikan Islam semakin terlihat ketika komunitas Muslim mulai tumbuh di kota-kota pelabuhan besar seperti Malaka, Aceh, Demak, Makassar, Banjarmasin, Ternate, dan Tidore. Di wilayah ini, pendidikan Islam mulai berkembang lebih terorganisasi. Kerajaan Samudra Pasai, misalnya, dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam tertua di Nusantara. Yahdi (2024) mencatat bahwa di Aceh Darussalam telah berdiri lembaga-lembaga yang menangani bidang pendidikan dan keilmuan, seperti Balai Seutia Hukama, Balai Seutia Ulama, dan Balai Jamaah Himpunan Ulama. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah berkembang secara terstruktur jauh sebelum masa kolonial.

Memasuki abad ke-15 dan ke-16, penyebaran Islam semakin luas, terutama di Jawa melalui peran Wali Songo yang menggunakan pendekatan budaya. Pada fase ini, pesantren mulai berkembang sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan hidup (Ya'kub, 2024). Perkembangannya didukung oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Mataram, dan Banten, dengan kiai sebagai pusat otoritas keilmuan (Adawiyah, 2026).

Metodologi pendidikan pada masa ini dipengaruhi kuat oleh pendekatan wali dan ulama, seperti keteladanan, penekanan pada akidah, syariah, dan akhlak, sikap inklusif, serta pendekatan kasih sayang yang efektif dalam penyebaran Islam dan pembentukan tradisi keilmuan (Yahdi, 2024).

Karakteristik utama pendidikan Islam pada masa pra-kolonial ini adalah kuatnya tradisi lisan (oral tradition) dalam transmisi ilmu, hubungan personal antara guru (kiai/ulama) dengan murid (santri), dan dominasi kajian teks-teks keagamaan klasik (kitab kuning). Proses pendidikan bersifat integral, tidak hanya mencakup transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter yang mulia. Pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam dengan dinamika unik yang berperan penting dalam membawa perubahan sosial melalui inisiatif dakwah Islam. (Herlambang, 2024).

## **Lahirnya Organisasi Pendidikan Islam pada Masa Kolonial**

Masuknya kolonial Belanda menciptakan dikotomi Pendidikan seperti sistem Barat modern vs. pesantren tradisional. Kebijakan kolonial yang berpihak pada pendidikan Kristen, termasuk mewajibkan pelajaran agama Kristen di sekolah bersubsidi yang memperdalam ketegangan dengan masyarakat Muslim (Ya'kub, 2024).

Kondisi ini memicu kesadaran umat Islam untuk memperbaiki pendidikan, bukan sekadar menolak kolonialisme, tetapi juga mengatasi ketertinggalan (Mardinal, 2023). Di Minangkabau awal abad ke-20, pengaruh pan-Islamisme melahirkan tiga bentuk pembaruan: penerbitan media Islam, transformasi surau menjadi madrasah, dan munculnya organisasi seperti Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Hidayat & Rohman, 2024).

Dari situlah berbagai organisasi Islam tumbuh sebagai gerakan kolektif yang menjadikan pendidikan sebagai alat utama membangun kesadaran, meningkatkan kualitas umat, dan memperkuat identitas Islam di bawah tekanan kolonial.

### **Muhammadiyah (1912)**

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang lahir pada 1 Agustus 1868 dari keluarga elit keagamaan Kesultanan Yogyakarta. Lahirnya Muhammadiyah tidak terlepas dari keprihatinan mendalam Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam Indonesia saat itu. Fadli (2022) menjelaskan bahwa terdapat tiga pokok keprihatinan yang melatarbelakangi pendiriannya, yaitu pertama, praktik keagamaan masyarakat Jawa yang cenderung sinkretis, kedua, sistem pendidikan yang belum mampu mengintegrasikan nilai iman dan kesalehan, dan ketiga, semakin intensifnya aktivitas misionaris Kristen yang dinilai dapat mengancam akidah umat Islam. Berangkat dari kondisi tersebut, Ahmad Dahlan berupaya melakukan pembaruan Islam secara terorganisasi melalui jalur pendidikan dan dakwah.

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah tampil sebagai organisasi Islam yang memelopori sistem pendidikan modern di Indonesia. Orientasi pedagogisnya mengadopsi sistem kelas bergaya Barat dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai Islam, yang mencerminkan gagasan "Islam Berkemajuan" atau Islam progresif (Adawiyah, 2026). Pendidikan Muhammadiyah tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga memasukkan mata pelajaran umum sebagai upaya mencetak generasi Muslim yang berilmu, beriman, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Fokus gerakan Muhammadiyah pun meluas pada bidang pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial sebagai bentuk respons terhadap problem keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan umat.

Dalam perspektif filsafat pendidikan, Hidayat (2025) menjelaskan bahwa Muhammadiyah merepresentasikan ideologi modernisme Islam yang menekankan rasionalisasi ajaran agama serta integrasi ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai keislaman. Kurikulum sekolah-sekolah Muhammadiyah dirancang untuk memadukan pendidikan agama dengan sains dan teknologi, sehingga mampu mendorong kemajuan umat secara holistik.

Perkembangan Muhammadiyah pada masa awal terbilang sangat pesat. Hingga tahun 1925, organisasi ini telah berhasil mendirikan sekitar 50 sekolah dengan jumlah murid mencapai 400 orang, sebuah capaian yang signifikan di tengah keterbatasan masa kolonial. Bahkan, menurut Fadli (2022), pada tahun 1938 Muhammadiyah telah memiliki 852 cabang dengan sekitar 250.000 anggota, serta mengelola 1.774 sekolah, 834 masjid, dan didukung oleh lebih dari 7.000 dai. Pertumbuhan yang pesat ini menunjukkan bahwa model pendidikan Muhammadiyah mampu menjawab kebutuhan umat Islam akan pendidikan modern yang tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Secara kelembagaan, Muhammadiyah memiliki struktur organisasi yang sistematis dan berjenjang, mulai dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai tingkat tertinggi, diikuti Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di tingkat provinsi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah di tingkat kabupaten atau kota, hingga Pimpinan Ranting Muhammadiyah di tingkat desa atau kelurahan (Fadli, 2022). Selain itu, Muhammadiyah juga membentuk berbagai organisasi otonom yang bergerak di bidang tertentu, seperti Aisyiyah yang didirikan pada tahun 1922 untuk pemberdayaan perempuan, serta Hizbul Wathan yang bergerak di bidang kepramukaan.

### **Nahdlatul Ulama (1926)**

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) tidak dapat dilepaskan dari dinamika keagamaan pada awal abad ke-20, ketika kalangan ulama tradisional mulai merasakan tekanan dari gelombang pembaruan Islam yang dianggap mengancam praktik keislaman yang telah mengakar di masyarakat. Dalam situasi tersebut, para ulama terdorong untuk membangun sebuah wadah bersama guna memelihara corak Islam yang terbuka, damai, dan berdampingan secara harmonis dengan tradisi lokal.

Gagasan pendirian organisasi ini digagas oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama sejumlah ulama muda, di antaranya K.H. Wahab Hasbullah, dengan terlebih dahulu mendapat restu dari K.H. Muhammad Kholil pada 1925. Setelah melalui berbagai persiapan, pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H, Jam'iyah Nahdlatul Ulama secara resmi berdiri di kediaman K.H. Wahab Hasbullah di Surabaya (Adawiyah, 2026). Nama Nahdlatul Ulama sendiri mengandung makna "Kebangkitan Ulama", mencerminkan semangat kolektif para pendirinya.

Organisasi ini dibangun di atas kesamaan orientasi keagamaan para ulamanya, baik dalam cara memahami, bersikap, maupun mengamalkan ajaran Islam dalam keseharian. Kesamaan pandangan tersebut kemudian diwadahi secara kelembagaan dalam bentuk jam'iyah yang bertujuan memperjuangkan Izzul Islam wal Muslimin secara bersama-sama (Adawiyah, 2026). Dalam hal ini, NU menempatkan diri sebagai representasi Islam tradisional yang teguh menjaga kesinambungan ajaran berbasis kultur pesantren.

Selain itu, NU juga tumbuh sebagai bentuk perlawanan terhadap arus reformisme dan pengaruh Wahabi yang dipandang berpotensi mengikis khazanah Islam lokal. Sebagai pijakan, NU berpegang pada kaidah al-muhafadzatu 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah, yakni merawat warisan lama yang masih relevan seraya membuka diri terhadap hal-hal baru yang lebih membawa kemaslahatan (Adawiyah, 2026). Prinsip ini menjadi kompas organisasi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan.

Di ranah pendidikan, NU berpijak kokoh pada tradisi pesantren yang menempatkan pewarisan ilmu-ilmu klasik sebagai inti dari proses pembelajaran. Pendidikan di lingkungan NU tidak semata mengejar penguasaan ilmu agama, melainkan juga membentuk kepribadian dan akhlak melalui kedekatan yang tulus antara kiai dan santri.

Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan di bawah LP Ma'arif NU menampilkan ideologi tradisionalisme progresif, yaitu mempertahankan keilmuan Islam klasik melalui kajian kitab kuning dan penghormatan terhadap otoritas ulama, namun tetap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sains (Hidayat, 2025).

### **Organisasi Islam Lainnya**

Selain Muhammadiyah dan NU, masa kolonial juga melahirkan berbagai organisasi Islam lainnya yang turut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam. Al-Washliyah didirikan di Sumatera Utara pada tahun 1930. Organisasi ini lahir dari sikap kritis para alumni dan murid senior Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) tentang ketidakpuasan mereka terhadap kondisi pendidikan Islam yang ada. (Sarianti, 2024). Dalam bidang akidah, Al-Washliyah mengikatkan diri pada paham Ahlussunnah Wal Jama'ah berdasarkan ajaran Abdul Hasan al-Asy'ari dan Abu Muslim al-Maturidi, sementara dalam bidang ibadah mengikatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Pada tahun 1937, jumlah Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) yang berafiliasi dengan gerakan ini diperkirakan mencapai lebih kurang 300 madrasah yang tersebar di seluruh Sumatera.

Sarikat Islam (SI) yang berdiri pada tahun 1912 juga memiliki peran penting dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia, meskipun lebih berfokus pada dimensi politik dan ekonomi. Gerakan yang awalnya bernama Sarikat Dagang Islam ini kemudian berkembang menjadi organisasi massa yang juga menaruh perhatian pada pendidikan umat (Fadli, 2022). Kehadiran

berbagai organisasi Islam ini menunjukkan betapa dinamisnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada masa kolonial, yang semuanya menjadikan pendidikan sebagai salah satu pilar perjuangan mereka.

### **Perkembangan pada Masa Kemerdekaan**

Perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa kemerdekaan diawali dengan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap pendidikan agama sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Indonesia berupaya membangun sistem pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa sendiri. Salah satu langkah penting adalah didirikannya Departemen Agama pada tahun 1946 yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola, membina, serta mengembangkan pendidikan agama di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mulai menyediakan tenaga pengajar agama serta mengatur pelaksanaan pendidikan agama di berbagai lembaga Pendidikan (Syahril 1984).

Pada masa ini, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pesantren yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional yang hanya mengajarkan ilmu agama mulai bertransformasi dengan memasukkan sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Selain itu, munculnya sekolah-sekolah modern membawa pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam, sehingga lembaga pendidikan Islam berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara tradisi dan modernitas dalam pendidikan Islam di Indonesia (Fahmi n.d.)

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam formal mulai memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah pada tahun 1950. Dalam pelaksanaannya, madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti tauhid, fiqih, dan tafsir, tetapi juga memasukkan pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa. Kurikulum madrasah dirancang dengan komposisi tertentu agar mampu menciptakan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan madrasah agar tidak tertinggal dibandingkan dengan lulusan sekolah umum serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa (Syahril 1984).

Selain berkembangnya madrasah, pemerintah juga mulai mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan umum. Pendidikan agama mulai diajarkan secara resmi di sekolah negeri dengan ketentuan tertentu, seperti harus mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama bekerja sama dalam mengatur pelaksanaan pendidikan agama tersebut, termasuk dalam hal kurikulum, tenaga

pengajar, dan pembiayaan. Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan Islam, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional(Syahril 1984).

Perkembangan lembaga pendidikan Islam juga terlihat dari semakin lengkapnya jenjang pendidikan yang tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pada tingkat dasar dan menengah terdapat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Sementara itu, pada tingkat perguruan tinggi didirikan lembaga seperti Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang kemudian berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan selanjutnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam semakin terorganisir dan memiliki sistem yang jelas dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas (Fahmi n.d.)

Meskipun mengalami perkembangan, pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah adanya dualisme sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda cenderung bersifat sekuler dan terpisah dari nilai-nilai agama, sementara pendidikan Islam berkembang secara mandiri di masyarakat. Dualisme ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Namun, secara bertahap pemerintah mulai berupaya mengintegrasikan kedua sistem tersebut agar dapat saling melengkapi dan mendukung tujuan pendidikan nasional(Syahril 1984).

historis, perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah ada sejak sebelum masa penjajahan. Pesantren menjadi cikal bakal lahirnya madrasah yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan formal. Dalam perkembangannya, madrasah mengadopsi sebagian sistem pendidikan modern dengan memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembaruan pendidikan Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat(Alfikri 2024)

Secara keseluruhan, perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa kemerdekaan menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan, baik dari segi kelembagaan, kurikulum, maupun peran pemerintah. Pendidikan Islam tidak hanya berkembang secara mandiri di masyarakat, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, upaya pengembangan dan pembaruan pendidikan Islam terus dilakukan untuk menciptakan generasi yang beriman, berilmu, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional (Fahmi n.d.)

## **Modernisasi Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru**

Era Orde Baru (1966–1998) membawa perubahan signifikan dalam lanskap pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah Orde Baru melakukan penetrasi yang kuat ke dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi Islam. Adawiyah (2026) mencatat bahwa pada masa Orde Baru, negara mengontrol kegiatan ormas sehingga ormas tidak dapat tumbuh, berkembang, dan berdaya secara memadai. Kondisi ini memaksa organisasi-organisasi pendidikan Islam untuk menavigasi kebijakan pemerintah dengan cermat.

Tonggak penting pada periode ini adalah terbitnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975. Kebijakan ini menyetarakan ijazah madrasah dengan ijazah sekolah umum, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja dengan kedudukan yang setara. SKB Tiga Menteri tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang sah (Kholilur, 2018). Sejalan dengan kebijakan tersebut, kurikulum madrasah kemudian distandarisasi dengan komposisi 70 persen pelajaran umum dan 30 persen pelajaran agama. Hal ini menjadikan madrasah tidak hanya berfokus pada ilmu keagamaan, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum yang relevan dengan kehidupan modern (Ya'kub, 2024).

Pada masa yang sama, pemerintah mulai mengembangkan Institut Agama Islam Negeri di berbagai kota besar sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan Islam yang lebih modern dan terstruktur. Jaringan IAIN ini kemudian menjadi fondasi utama bagi perkembangan pendidikan tinggi Islam negeri yang semakin pesat, terutama pada era reformasi. Modernisasi juga mulai merambah pesantren. Zarkasyi mencatat munculnya pesantren modern seperti Pesantren Gontor yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum serta bahasa asing. Model pendidikan ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.

Di tengah tekanan politik pada masa Orde Baru, organisasi-organisasi Islam tetap aktif dalam mengembangkan pendidikan. Salah satu peristiwa penting adalah keputusan Nahdlatul Ulama untuk kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo tahun 1984. Di bawah kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid, NU menyatakan keluar dari politik praktis dan kembali memfokuskan diri sebagai organisasi keagamaan dan pendidikan. Fadli (2022) menjelaskan bahwa keputusan ini membuat warga dan elite NU tidak lagi disibukkan oleh urusan politik, sehingga dapat lebih fokus pada pengembangan pendidikan. Adawiyah (2026) menambahkan bahwa Abdurrahman Wahid mendorong keterbukaan pendidikan NU terhadap ilmu pengetahuan

modern, nilai-nilai demokrasi, serta prinsip kemanusiaan, tanpa meninggalkan sikap inklusif dan penghargaan terhadap tradisi. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembaruan dari dalam tubuh NU dengan tetap mempertahankan identitas tradisionalnya.

Sementara itu, Muhammadiyah terus memperluas jaringan pendidikannya secara signifikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Fadli (2022) mencatat bahwa hingga tahun 2005 Muhammadiyah telah mengelola ribuan lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, madrasah, hingga perguruan tinggi, termasuk universitas, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Data tersebut menunjukkan besarnya kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan pendidikan nasional, sehingga menjadikannya salah satu pengelola pendidikan swasta terbesar. Ciri khas pendidikan Muhammadiyah terletak pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern dalam sistem pendidikan yang terstruktur (Adawiyah, 2026).

Selain itu, organisasi Islam lainnya seperti Persatuan Islam dan Persatuan Umat Islam juga turut berperan dalam pengembangan pendidikan Islam pada periode ini. Rahmat (2023) menegaskan bahwa organisasi-organisasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam memajukan institusi pendidikan di Indonesia. Keberagaman organisasi pendidikan Islam ini pada akhirnya memperkaya khazanah pendidikan nasional dan memperkuat peran pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat.

### **Transformasi Pendidikan Islam pada Era Reformasi**

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam perubahan berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan Islam di Indonesia. Runtuhnya rezim Orde Baru membawa suasana baru berupa demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan. Ketiga hal ini memberikan peluang besar bagi pendidikan Islam untuk berkembang secara lebih dinamis, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan zaman (Mei Nuri, 2024).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat posisi pendidikan agama di semua jenjang, sekaligus membuka peluang bagi pesantren untuk masuk ke sistem pendidikan formal dan memperoleh pengakuan setara dengan sekolah umum. Sementara itu, otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi keleluasaan bagi daerah, madrasah, dan pesantren dalam pengelolaan pendidikan, meski juga memunculkan kesenjangan kualitas antarwilayah.

Pada pendidikan tinggi, terjadi transformasi dengan perubahan IAIN menjadi UIN untuk memperluas cakupan keilmuan, sehingga tidak hanya fokus pada studi Islam tetapi juga ilmu

umum (Mustafida, 2022). Selain itu, muncul Sekolah Islam Terpadu yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum, berkembang pesat terutama di kalangan masyarakat Muslim kelas menengah (Prima, 2025).

Peran organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah semakin kuat dalam pengembangan pendidikan melalui peningkatan kualitas, kurikulum, dan pendidikan karakter (Nurul, 2023). Pemerintah juga semakin bersinergi dengan organisasi masyarakat, membuka ruang partisipasi yang lebih luas (Rahmat, 2023). Keterlibatan tokoh seperti Amin Rais dan Abdurrahman Wahid dalam politik nasional turut memengaruhi arah kebijakan pendidikan (Fadli, 2022).

Dalam praktiknya, terjadi integrasi ilmu agama dan umum. Muhammadiyah menekankan modernisasi berbasis sains dan teknologi, sedangkan Nahdlatul Ulama mempertahankan tradisi pesantren yang moderat namun tetap adaptif (Adawiyah, 2026). Keduanya saling melengkapi dalam membentuk wajah pendidikan Islam di Indonesia.

Selain itu, berkembangnya perguruan tinggi Islam milik organisasi masyarakat serta penguatan integrasi pesantren dengan pendidikan formal semakin memperkaya sistem pendidikan Islam (Adawiyah, 2026). Program moderasi beragama juga menjadi fokus penting untuk menanamkan toleransi dan mencegah ekstremisme (Rahmat, 2023).

Secara keseluruhan, pendidikan Islam di era reformasi berkembang lebih beragam dan terbuka, namun tetap berpijak pada kerangka filosofis religius-konservatif, religius-rasional, dan pragmatis-instrumental, serta mulai mendapat perhatian internasional sebagai model integrasi ilmu (Hidayat, 2025).

### **Tantangan Pengembangan Organisasi Pendidikan Islam**

Di tengah berbagai capaian dan perkembangan positif, pengembangan organisasi pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks era Industri 4.0 dan Society 5.0 yang terus berkembang. Tantangan dalam pengembangan organisasi pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari dinamika historis yang kompleks, mulai dari marginalisasi pada masa kolonial hingga ketimpangan pengakuan dalam sistem pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Lembaga seperti pesantren dan madrasah kerap menghadapi persoalan legitimasi, baik dari sisi kebijakan maupun pengakuan ijazah, serta harus beradaptasi dengan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang berdampak pada pengembangan kurikulum.

Selain itu, intervensi politik dan dominasi birokrasi pendidikan sering kali membatasi kemandirian organisasi, sementara secara internal masih dihadapkan pada keterbatasan sumber

daya, citra kualitas yang rendah, dan dominasi peserta didik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Di sisi lain, tuntutan modernisasi dan kebutuhan akan relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia kerja juga menjadi tantangan besar, sehingga pendidikan Islam dituntut untuk terus berinovasi tanpa kehilangan identitas keislamannya (Basri, 2021).

Evolusi organisasi pendidikan Islam di Indonesia diwarnai oleh dialektika antara tantangan internal dan eksternal. Secara internal, lembaga-lembaga ini masih bergelut dengan keterbatasan sumber daya, isu legitimasi, serta basis demografi siswa yang didominasi ekonomi menengah ke bawah. Sementara secara eksternal, gelombang pembaruan menuntut adanya integrasi kurikulum antara disiplin agama dan sains, serta modernisasi sistem manajerial. Proses transformasi ini kian kompleks akibat tekanan kebijakan politik dan warisan kolonial. Walhasil, organisasi pendidikan Islam kini berada pada titik di mana mereka harus mampu berinovasi secara adaptif tanpa mengabaikan fundamen nilai keislamannya (Ahmad, 2022).

Tantangan pengembangan organisasi pendidikan Islam di Indonesia terlihat dari dinamika sejarahnya. Lembaga pendidikan Islam seperti surau, pesantren, dan madrasah mengalami perubahan akibat perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Sebagian lembaga mengalami penurunan fungsi bahkan hilang karena tidak mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan modern. Selain itu, perubahan kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan umum juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga identitas keislaman. Di sisi lain, tuntutan globalisasi dan kebutuhan masyarakat mengharuskan lembaga pendidikan Islam untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif (Hidra, 2023).

Kondisi pendidikan Islam saat itu tergolong tertinggal, dengan sistem pembelajaran yang masih sederhana dan terbatas pada aspek keagamaan saja tanpa mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum. Selain itu, adanya diskriminasi dari pemerintah kolonial Belanda yang lebih memprioritaskan pendidikan Barat serta mendukung misi kristenisasi semakin mempersempit ruang gerak lembaga pendidikan Islam. Hal ini menyebabkan umat Islam mengalami keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan dan sulit bersaing dengan sistem pendidikan modern.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari dalam masyarakat itu sendiri, seperti praktik keagamaan yang menyimpang, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta resistensi terhadap pembaruan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan. Upaya modernisasi pendidikan Islam, termasuk penggabungan ilmu agama dan ilmu umum,

seringkali mendapat penolakan dan tuduhan negatif dari masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan lembaga pendidikan Islam dalam mengikuti perkembangan zaman turut memperberat proses pengembangan organisasi pendidikan Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal (Wahyu, 2018).

Pengembangan organisasi pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan sejarah yang kompleks, mulai dari tekanan kolonial Belanda dan Jepang hingga ancaman ideologi transnasional seperti gerakan Wahabi radikal yang mengancam tradisi lokal. Secara internal, lembaga pendidikan ini harus bergelut dengan masalah representasi dan stigma tradisionalisme, sementara secara eksternal mereka dituntut menghadapi arus globalisasi, westernisasi, serta infiltrasi paham radikal seperti ISIS dan HTI yang masuk ke institusi pendidikan. Sebagai respons, organisasi seperti Nahdlatul Ulama mengusung konsep moderasi Islam dan Islam Nusantara sebagai strategi untuk mengintegrasikan nilai-nilai dasar agama dengan tuntutan zaman, sekaligus menjadikan moderasi sebagai arus utama kurikulum pendidikan guna menjaga stabilitas ideologi Pancasila dan identitas keislaman di tengah dinamika politik global (Jauhar, 2020).

Pertama, adanya tantangan dualisme sistem pendidikan warisan kolonial yang menciptakan dikotomi tajam antara sekolah umum (sekuler) dan pesantren/madrasah. Organisasi pendidikan Islam dipaksa berjuang untuk menyeimbangkan kurikulum agar institusi mereka tidak hanya dianggap sebagai tempat belajar agama, tetapi juga mampu mencetak lulusan yang menguasai sains dan teknologi. Kedua, adanya hambatan politis dan regulasi yang restriktif, mulai dari kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda hingga upaya penyeragaman ideologi di masa Orde Baru, yang menuntut organisasi untuk terus melakukan lobi dan adaptasi struktural agar tetap legal. Ketiga, tantangan modernisasi manajerial di mana organisasi harus merombak pola kepemimpinan tradisional menjadi sistem administrasi pendidikan yang lebih profesional dan terukur guna menjawab persaingan global serta tuntutan standar mutu nasional tanpa menghilangkan identitas keislaman yang menjadi landasannya (Fahri, 2025).

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkembangan organisasi pendidikan Islam di Indonesia berlangsung panjang dan dinamis, dari lembaga informal seperti masjid dan pesantren hingga menjadi institusi modern yang diakui secara luas. Lahirnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama pada masa kolonial menjadi titik penting dalam membentuk pendidikan Islam yang lebih terstruktur dan

berorientasi pada pemberdayaan umat. Pada masa kemerdekaan dan Orde Baru, pendidikan Islam semakin terintegrasi dalam sistem nasional melalui pengakuan madrasah dan kebijakan pemerintah. Memasuki era reformasi, perkembangannya makin terbuka dan adaptif, ditandai dengan transformasi kelembagaan, penguatan pesantren, dan munculnya model pendidikan terpadu.

Secara keseluruhan, organisasi pendidikan Islam bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan nasional, melainkan fondasi utama yang turut membentuk karakter bangsa dan berkontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R. (2026). Tracing the roles of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in the stability of Islamic education in Indonesia. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 9(1), 28–43.
- Alfikri, H. H. (2024). Perkembangan lembaga pendidikan madrasah di Indonesia pra kemerdekaan tahun 1908–1942. 6(1), 76–99.
- Ariza, H. (2023). Lembaga pendidikan Islam dalam lintasan sejarah di Indonesia (Kajian historis perkembangan lembaga pendidikan Islam). *SURAU: Journal of Islamic Education*, 1(1), 1–14.
- Basri, S. (2021). Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Mubtadiin*, 7(1), 122–144.
- Fadli, M. (2022). Pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi Islam: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Jami'atul Washliyah. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 5(3).
- Fuad, A. J. (2020). Akar sejarah moderasi Islam pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 153–168.
- Herlambang, M., Muqowim, M., & Rofik, R. (2024). Sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 8(2), 275–296.
- Hidayat, F. (2024). Karakteristik pendidikan dan ilmuwan Muslim periode keemasan 750–950 M. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 7(1), 113–126.
- Hidayat, F. (2025). Trikotomi filsafat pendidikan Islam di tengah dinamika lembaga pendidikan Islam kontemporer. 9(1).
- Hidayat, F., & Rohman, M. (2024). Modernisasi pendidikan Islam di Minangkabau: Studi tentang interaksi dengan pan-Islamisme (1909–1945). *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 9(2), 169–186. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v9i2.10955>
- Hidayat, F., Khairuddin, H. B., Sumarto, S., Syafryadin, S., & Yahya, S. (2025). Diseminasi filsafat pendidikan Islam berdasarkan pengalaman praktis di Indonesia pada forum internasional di KIDU Malaysia. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(4), 923–933. <https://doi.org/10.60004/komunita.v4i4.332>
- Hidayati, N., Muhid, A., & Sahri, I. K. (2023). Educational dualism in Indonesia: Systematic literature review. *Jurnal Tarbiyatuna*, 14(2), 130–146.

- Lenggono, W. (2018). Lembaga pendidikan Muhammadiyah (Telaah pemikiran KH Ahmad Dahlan tentang pembaruan pendidikan Islam di Indonesia). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1), 43–62.
- Mustafida, M., Warisno, A., Andari, A. A., & Ansori, M. A. (2022). Dinamika organisasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 4(3), 496–508.
- Nasimuddin, N., Hasani, M. Z., & Muhammad, M. (2024). Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1356–1364.
- Rahman, K. (2018). Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–14.
- Rahmat, M. (2023). Peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengembangan mutu pendidikan Islam di Indonesia. *Tsamratul-Fikri*, 17(1), 41–52.
- Sari, M. N. H., Hawa, E., Sari, F. A., & Ifendi, M. (2024). Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada era reformasi. *ISEDU: Islamic Education Journal*, 2(2), 127–133.
- Sarianti, O., & Zulmuqim, M. Z. (2024). Peran Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan PERTI dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam.
- Saputra, P. R., Ananda, R., Longdewa, S., Demina, D., & Yahya, M. (2025). Sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 3(1), 187–200.
- Suja'i, A., & Baihaqi, M. A. (2022). Peran ulama dan ormas Islam dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(2), 139–150.
- Syahril. (1984). Pendidikan Islam masa awal kemerdekaan, 1–14.
- Tarigan, M., Ahmad, A. K., Fadilla, A. S., & Hartina, D. (2023). Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(3), 883.
- Yahdi, M. (2023). Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 4(1), 64–72. <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i1.39183>
- Ya'kub, & Rama, B. (2024). Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15(1).